

NOTULENSI Webinar 4

**Peran Pelaku Usaha Dalam Investasi di Sektor Air Minum dan Sanitasi - Sanitation and Water for All (SWA) and National Mutual Accountability Mechanism**

**HYBRID** - *talkshow* dan FGD tatap muka

ONSITE: Century Park Hotel Jakarta; ONLINE: Zoom Platform, 20 April 2022

Water.org dan Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) telah menyelenggarakan kegiatan *talkshow* dan *focus group discussion* berjudul "Peran Pelaku Usaha dalam Investasi di Sektor Air dan Sanitasi" pada Rabu, 20 April 2022 di Century Park Hotel Jakarta dalam rangka menyambut Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) serta Sector Ministers' Meeting 2022. Kegiatan tersebut diisi oleh empat narasumber sebagai berikut:

<b>SESI TALKSHOW</b>	
<b>Pembicara</b>	<b>Jabatan</b>
Tri Dewi Virgiyanti	Direktur Perumahan dan Pemukiman Bappenas RI
Irma Setiono	Senior Water and Sanitation Specialist World Bank
Fauzan Nasution	FORKALIM
Yayat Supriatna	Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti

Sebanyak 113 peserta dari berbagai latar belakang, khususnya perusahaan di sektor infrastruktur, keuangan, hingga mitra pembangunan turut menghadiri acara tersebut secara tatap muka maupun daring.

Menurut Oswar Mungkasa selaku Pembina Jejaring AMPL dalam pidato pembukaannya, 20 tahun yang lalu terdapat 77 juta orang yang buang air besar sembarangan, namun kini berkurang drastis di angka 30 juta orang. "Apa yang kita lakukan ini sudah benar sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi masih perlu usaha yang lebih. Kita melihat ada peluang ketika teman-teman pelaku usaha bisa secara intensif membantu kita dalam mencapai sasaran-sasaran yang diharapkan," kata Oswar selagi mengajak partisipasi pelaku usaha dalam meningkatkan akses terhadap air dan sanitasi. "Pelaku bisnis bisa berkontribusi ke dalam kegiatan ini dalam tiga cara, yang pertama dengan investasi langsung, yang kedua memfasilitasi teman-teman yang ingin berpartisipasi (investasi) langsung .... Yang ketiga adalah kita sendiri yang menjadi pelaku di internal," sambungnya.

Sementara itu, Senior Operations Director Water.org, Don Johnston memaparkan masih banyak penduduk yang belum memiliki akses terhadap air dan sanitasi. "Masih terdapat 38 juta penduduk yang belum memiliki akses sanitasi dan 27 juta orang yang belum memiliki akses air yang layak," tuturnya. "Impian kami adalah semua orang memiliki akses air dan sanitasi yang layak. Pendekatan dan strategi yang kita gunakan adalah berkolaborasi dengan para pelaku pengusaha di sektor air dan sanitasi. Kami mendukung, memfasilitasi, dan kadang-kadang mendorong investasi alternatif di sektor air dan sanitasi," lanjutnya selagi memperkenalkan Water.org.

Water.org juga menyerukan agenda kolaborasi di antara sektor swasta dalam meningkatkan akses air dan sanitasi yang efektif dan *sustainable*. "Kami ingin bekerja sama dengan rekan-rekan di sini untuk

dapat memaksimalkan potensi bisnis di sektor air dan sanitasi. Ke depannya, kami ingin berkolaborasi dengan lintas kementerian/lembaga, mitra pembangunan lainnya, perusahaan swasta, penyedia jasa teknologi, dan penyedia modal sehingga bisa menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan perbaikan sarana. Kerja bersama meski penuh tantangan akan jauh lebih efektif dan *sustainable* bila dibanding kerja sendiri," tutupnya.

Bicara mengenai akses air dan sanitasi di Indonesia, Direktur Perumahan dan Pemukiman Bappenas RI Tri Dewi Virgyanti menjelaskan bahwa akses yang dimaksud harus bersifat universal, serta tidak hanya layak namun juga aman bagi semua. "Pemerintah memang menjadi *leading institution/sector* namun kolaborasi tetap diperlukan karena akan lebih cepat dan banyak inovasi-inovasi dari eksternal pemerintah yang penting," sebutnya. Virgi kemudian memberi penjelasan mengenai Mekanisme Akuntabilitas Mutual (MAM) yang hadir untuk menjaga komitmen bersama dalam mencapai target akses air dan sanitasi di Indonesia, terlebih dengan adanya status keanggotaan Indonesia di Sanitation and Water for All (SWA) sejak 2017. "Di dalam MAM ini maksudnya adalah semua pihak memiliki komitmen dan visi yang sama, serta kemudian mendorong pertanggungjawaban masing-masing dalam artian bagaimana para pemangku kepentingan dapat saling bertanggung jawab terhadap komitmen yang sudah dibuat, tentu saja dengan tujuan bersama yang dibangun berdasarkan kepercayaan, kesepahaman, dan kolaborasi," lanjutnya.

"Dalam konteks SWA, Mekanisme Akuntabilitas Mutual ini merupakan proses di mana mitra secara bersama membangun sistem akuntabilitas yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistik, serta *timeline*-nya jelas," lanjut Virgi. Virgi menjelaskan bahwa proses penerapan MAM sebetulnya sudah dimulai, serta menyatakan bahwa pemerintah akan bertemu dengan berbagai *stakeholder* untuk mendiskusikan bagaimana MAM disampaikan di forum SWA. "Langkahnya tentu saja kita menentukan komitmen MAM nasional, menilai dan mendiskusikan secara berkala komitmen tersebut tadi, kemudian harus ada ruang untuk mengidentifikasi tindakan perbaikan, karena perbaikan ini masih sangat luas yang harus kita lakukan. Apalagi menuju akses universal aman, masih banyak PR kita. Kemudian proses tersebut harus dikomunikasikan dengan baik supaya MAM ini bisa dijadikan panduan," jelasnya.

Virgi menjelaskan bahwa pihak swasta bisa mendukung MAM melalui banyak cara, "Kalau bicara *stakeholder*-nya, tidak hanya pemerintah, tidak hanya jejaring mitra pembangunan, tetapi juga peran bisnis/swasta. Kami berharap ada dukungan juga untuk pencapaian komitmen termasuk investasi infrastruktur dan infrastruktur ataupun kemitraan dan mobilisasi pembiayaan," jelasnya. "Yang kita identifikasi di RPJMN, kita membutuhkan biaya yang tidak sedikit baik untuk limbah domestik maupun air minum. Sekitar 123 triliun untuk air minum dan 140 triliun untuk limbah domestik. APBN hanya bisa memenuhi 10-30 persennya. Artinya memang perlu kolaborasi dengan pendanaan lain, baik APBD, maupun yang kami harapkan adalah dari masyarakat dan swasta," sambungnya. Lebih lanjut, Virgi juga memaparkan bahwa pemerintah sudah memiliki *roadmap* sampai 2030, di mana targetnya terdapat 45 persen air minum aman yang membutuhkan pendanaan sekitar Rp200 triliun. Terdapat pula potensi pendanaan alternatif lainnya melalui (1) CSR dan filantropi, (2) ZISWAF, (3) Mikro kredit, dan (4) KPB.

Senior Water and Sanitation Specialist World Bank, Irma Setiono setuju dengan paparan Virgi bahwa diperlukan investasi besar di luar dana pemerintah untuk memastikan akses air dan sanitasi universal yang layak. "Investasi ini bukan hanya untuk membangun sarana dan prasarana yang baru, tetapi juga investasi untuk memperbaiki atau *re-profit* infrastruktur yang ada. Contohnya PDAM saja angka

kehilangan airnya ada yang besar walau jaringan distribusinya sudah lama," jelasnya. Lebih lanjut, Irma menjelaskan bahwa Indonesia juga butuh aliran investasi untuk pengembangan teknologi di sektor air dan sanitasi yang sudah jadul, serta Investasi SDM juga diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengelola/penyelenggara.

Irma juga mematahkan anggapan bahwa investasi air dan sanitasi selalu berskala besar, "Sebetulnya banyak peluang untuk bisa berkiprah dalam percepatan akses air minum dan sanitasi aman melalui investasi kecil-menengah. Contohnya sekarang banyak PDAM yang bekerja sama dengan pihak swasta melalui mekanisme B2B dalam berbagai skala dan berbagai kegiatan, tidak hanya melulu membangun pipa baru. Bisa saja kerja sama B2B dilakukan melalui kontrak berbasis kinerja untuk penurunan kebocoran, peningkatan efisiensi energi, dan sebagainya," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menjelaskan secara sederhana model bisnis di sektor air dan sanitasi. "Kalau bicara air itu bicara tentang ketersediaan, kalau sanitasi bicara tentang pengelolaannya. Yang jadi pertanyaan, air ini mau bisnis atau pelayanan?" sebutnya. Yayat juga menegaskan bahwa mengklaim pasar di sektor sanitasi jauh lebih sulit dibanding di sektor air, "Ada kebiasaan buruk di kita. Kita ini kalau yang masuk, itu mau bayar lah. Kalau air beberapa orang mungkin butuh bayar atau *free*, tapi kalau bagian belakang, itu *free* semua," lanjutnya.

Namun, Yayat menjelaskan bahwa aspek ketersediaan di sektor air merupakan tantangan utama, serta investasi di sektor air terhambat oleh masalah tarif, "berapapun besar investasi yang dilakukan, kalau tarifnya tidak menarik, apalagi kalau di daerah itu air minumnya tarif politik. Ditentukan oleh dewan sehingga tarifnya tidak menarik bagi investasi. Jadi tantangan bagi kita adalah bagaimana kita melakukan terobosan agar tarif ini menjadi suatu daya tarik," jelasnya. Yayat menjelaskan bahwa tarif seharusnya sejalan dengan kualitas, hanya saja masyarakat masih menerima air ala kadarnya dalam kualitas apapun, sehingga tak ada kritik untuk upaya perbaikan. Selain itu, semakin besar daya ekonomi masyarakat, maka semakin besar pasar sektor air di sana.

Irma kemudian menyatakan setuju bahwa masyarakat Indonesia lebih "menerima apa adanya" sehingga tak ada *pressure* perbaikan layanan bagi layanan air dan sanitasi. "Untuk bisa mendapat persetujuan penyesuaian tarif dari kepala daerah, PDAM harus memiliki *business plan* yang baik. Mereka harus bisa membuktikan akan ada peningkatan pelayanan serta mereka sudah mengelola secara efisien. Nah gimana mau di-*approve* penyesuaian tarifnya kalau angka kebocoran masih sangat tinggi, operasional masih sangat tidak efisien, airnya kadang ada kadang engga," tuturnya. Dalam hal ini Irma menjelaskan bahwa PDAM seperti ini belum bisa melakukan investasi karena berpotensi besar hanya membuang waktu untuk transaksi yang gagal. Terkait sanitasi, Irma merasa perlu merubah perspektif bahwa sanitasi adalah sesuatu untuk dibuang. "Sumber daya alam kita makin terbatas, terutama sumber daya air. Sanitasi yang diurus dengan baik itu adalah sumber daya yang sangat bisa dimanfaatkan, jadi sanitasi itu adalah sumber daya baru," sebutnya. Irma menjelaskan bahwa apabila kita membeli air, maka kita juga perlu memikirkan kemana air tersebut dibuang, atau bagaimana mendaur ulang limbah air tersebut supaya bisa bermanfaat.

Melanjutkan, Fauzan Nasution dari FORKALIM memaparkan bahwa air dan sanitasi merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan. Sayangnya, pasar lebih memilih sektor air minum dibanding sanitasi/limbah domestik. Selain itu, Fauzan menekankan pentingnya regulasi dalam peningkatan investasi di sektor air dan sanitasi, "Kita paham bahwa regulasi itu penting sekali mengamankan

investasi yang akan dilakukan pihak swasta. Sebenarnya pemerintah dari awal sudah memikirkan ini, mulai dari UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 22/2018 tentang SPM, yang terakhir Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN. Pemerintah menyadari bahwa investasi dari swasta itu harus bisa kita laksanakan dengan dibuatnya semacam regulasi," tuturnya.

Fauzan menjelaskan bahwa "kita (swasta) sebagai pihak yang melaksanakannya harus berkreasi bagaimana kita mengamankan ini. Tadi kita berbicara tentang *stunting*, banyak faktor-faktornya, salah satunya air dan limbah domestik," jelasnya. Fauzan juga menjelaskan bahwa banyak yang lupa mengenai tangki *septic* yang tidak ramah lingkungan. Dalam hal ini Fauzan menjelaskan pentingnya regulasi dalam mengatur air limbah domestik. Terdapat Perda yang mengatur pengelolaan air dan sanitasi, namun turunannya yang masih kurang jelas. Bantuan tangki *septic* dari pemerintah juga tidak akan mencukupi penggantian tangki *septic* penduduk. "Misalnya dalam mendirikan IMB, dibuatlah suatu aturan harus mengganti tangki *septic* yang kedap. Itu harus kita lakukan. Nah ini tidak bisa sendiri juga pemerintah, harus bekerja sama dengan sektor-sektor riil, contohnya *developer*. *Developer* harus memikirkan ini, ke depannya mereka harus membangun perumahan itu harus dengan tangki *septic* kedap. Nah ini tercipta juga peluang untuk tangki *septic*. Ini kreasi kita juga bahwa swasta bisa masuk di sini," jelasnya.

Fauzan kemudian juga menjelaskan konsep aman dalam dua sistem, yakni perpipaan dan non perpipaan. Perpipaan memiliki cost yang besar dan swasta belum tentu tertarik. "Di Medan dibangun perpipaan terpusat itu tahun 1996 sampai sekarang tahun 2021, pelanggan baru mencapai 20.000 rumah tangga. Berarti kalau kita hitung-hitung setahunnya ada 800 rumah tangga. Itu dibantu pemerintah, swasta tidak masuk ke sana. Kalau air minum berlomba-lomba swasta masuk. Tapi kalau sanitasi berlomba-lomba juga tapi mundur," tuturnya. Fauzan kemudian menjelaskan "ada aturan di PermenLHK 1968 bahwa buangan dari proses usaha itu tidak boleh di drainase, tapi harus ke badan air. Tapi apakah seluruh perusahaan dekat dengan badan air? Nah ini suatu peluang yang bisa kita tangkap sebenarnya," jelasnya.

Melanjutkan, Yayat menjelaskan bahwa pengelolaan air dan sanitasi tidak bisa berdiri sendiri, namun harus terintegrasi dengan program lain. "Misalnya persoalan *stunting*. Jadi air untuk kesehatan, harus ada labelisasi bahwa ini untuk kesehatan dalam hal kualitas hidup, penurunan *stunting*, dan sebagainya. Kedua, berapa banyak data *stunting* di setiap kota/kabupaten. Katakanlah angka batas 10% *stunting* di wilayah ini maka wajib ada bentuk peningkatan pelayanan akses air bersih. Pertanyaannya bagaimana ruang investasi tersebut dibuka? Bisnis air ini kan bukan bisnis yang *no choice* ya. Kalau ada yang *free*, orang pasti lari ke *free* seperti pengambilan air tanah, air sumur. Bawa penyediaan air ini untuk investasi itu harus bermitra B2B, maka mau tidak mau alangkah bagusnya pola kerjasamanya dilakukan juga di BUMN yang sehat atau di wilayah-wilayah yang daya belinya sudah kuat," tuturnya. Yayat juga menjelaskan bahwa kekuatan komunitas itu wilayah-wilayah yang terbatas pelayanan airnya, air kemasan dan air isi ulang dominan. Ketika pemerintah itu kemampuannya lemah, masyarakat bisa cari kok," lanjutnya.

Sebagai penutup, Don Johnston menjelaskan bahwa Water.org telah berperan sebagai fasilitator, pendukung, dan kadang-kadang pendorong akses air dan sanitasi di Indonesia. "Kita melihat masyarakat berpendapatan rendah sebenarnya mampu mengatasi masalah mereka sendiri apabila diberi peluang. Dan itu melalui alat *microfinance* untuk meningkatkan kemampuan masyarakat berpendapatan rendah untuk mengatasi masalah air dan sebagian masalah sanitasi juga. Saat ini ketika kita memonitor pembiayaan di tingkat rumah tangga jauh lebih banyak dipakai untuk sanitasi

dibanding air, karena sudah banyak permintaan untuk toilet dan *septic tank* juga. Jadi walaupun kita melihat ada banyak tantangan, banyak kekurangan dalam struktur pasar untuk air, juga ada *progress* kita melihat bahwa ada PDAM bagus yang mulai mencetak laba dan yang sudah memiliki riwayat yang bagus supaya menjadi menarik bagi perusahaan swasta untuk kontrak kerjasama B2B," jelasnya. Don kemudian menjelaskan bahwa tantangan yang lebih besar bagi sanitasi tetap ada karena kita harus melihat solusi model bisnis yang layak untuk situasi sekarang. Untuk itu ada banyak potensi bisnis di sektor tersebut.

#### **HASIL FGD - Focus Group Discussion:**

Peserta yang hadir secara tatap muka di venue dikelompokkan menjadi 3 kelompok kecil untuk membahas:

##### **Kelompok 1: Investasi Infrastruktur di Sektor Air (Fasilitator: Eko WIji Purwanto)**

Kelompok ini membahas kesempatan investasi bagi sektor air terutama yang dipimpin oleh pelaku usaha PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia. Kelompok ini menemukan bahwa banyak hambatan yang dialami dalam menyalurkan investasi di sektor ini akibat proses birokrasi yang rigid dan panjang dalam pengambilan keputusan proses pengadaan, sehingga sulit untuk melibatkan pendanaan yang bersumber non-publik seperti yang telah disebutkan dalam talkshow. Akan tetapi, banyak kesempatan yang dapat dibuka terutama dalam hal investasi dalam mitigasi dan mengadaptasi perubahan iklim, seperti pengurangan kebocoran air, efisiensi energi, dan perubahan energi fosil menuju energi terbarukan.

##### **Kelompok 2: Investasi Infrastruktur di Sektor Sanitasi (Fasilitator: Wahyudin)**

Kelompok 2 mengakui banyak mengalami kesulitan dalam perizinan toilet berbayar dan izin usaha sanitasi. Akan tetapi, terdapat beberapa upaya dalam pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan iklim, seperti penggunaan *raised bed garden* dan pembangunan fasilitas tanpa cairan kimia. Sektor sanitasi masih kesulitan dalam kordinasi untuk membuka peluang investasi, sehingga beberapa alternatif terdiri dari dana filantropis (CSR dan zakat), kredit mikro (termasuk fintech dan crowdfunding), dan bahkan telah terbentuknya koperasi sanitasi yang menaungi Kelompok Swadaya Masyarakat di bidang sanitasi sebagai anggotanya.

##### **Kelompok 3: Investasi Keuangan di Rumah Tangga (Fasilitator: Aldi Surianingrat)**

Bagi sektor keuangan, air dan sanitasi menjadi hal yang baru dan belum semua lembaga yang diundang telah berkontribusi dalam pasar ini. Beberapa yang telah berpartisipasi memberikan pengalamannya dalam pembuatan produk kredit mikro yang disalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan fasilitas cicilan untuk membangun sarana air dan sanitasinya di rumah. Selama ini, sarana yang terbangun masih berbentuk pemenuhan akses air dan sanitasi dasar, namun ke depannya diharapkan bisa bertransformasi menuju akses aman. Karena berada di bawah otoritas OJK, mereka diwajibkan untuk melaporkan taksonomi hijau di bawah kebijakan Sustainable Finance sehingga itu salah satu strategi terkait pelaporan dan transparansi kepada publik. Mereka pun berharap bisa melakukan advokasi kepada pemerintah untuk mengembangkan skema insentif agar dapat memperluas jangkauan pasar kredit mikro untuk air dan sanitasi kepada masyarakat di lapisan ekonomi bawah.